



bercita-cita untuk bersatu, (2) adanya daerah tertentu, (3) adanya pemerintah yang berdaulat (Sutomo,1993:25)

Untuk menyatukan ketiga unsur tersebut, menurut Munawir Syazali perlu adanya sistem politik, yaitu suatu konsepsi antara lain ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara-cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut (Munawir,1993:2-3)

Lebih lanjut David Easton menyatakan pula bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai perangkat interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat (Haryanto, 1982:2)

Dengan adanya sistem politik dalam suatu negara, berarti berdirinya suatu negara memiliki dasar negara. Seorang penulis bernama Paul Renan, menyatakan bahwa "dasar negara ialah keinginan para warga untuk bersatu" (Projudikoro,1981:17) yang selanjutnya akan dijadikan ideologi bagi bangsa tersebut, yang merupakan 'dasar filosofi' bagi negara yang bersangkutan.

Sistem politik di Indonesia merdeka mulai dibangun setelah 3½ (tiga setengah) tahun Indonesia dijajah oleh Jepang. Pendudukan Jepang tersebut telah mempertebal pertahanan fisik dan rohani, terbinanya asas perjuangan ko dan non serta mendekatkan pada Indonesia merdeka. Setelah menaglami masa penjajahan selama tiga setengah abad. Mula-mula Jepang mendirikan 'Dokoritsu Junbi Chosakai' atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BFUPKI) pada tanggal 29 April 1945. Oleh Jepang, usaha membentuk Badan Penyelidik ini dimaksudkan agar Jepang mendapat bantuan dari bangsa kita untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Namun tujuan itu berhasil dibelokkan dari para pejuang bangsa kita. Badan Penyelidik bertugas antara lain menyusun rancangan ketatanegaraan Indonesia merdeka pada kelak kemudian hari.

Keanggotaan Badan Penyelidik ini sangatlah komplek. Hal itu dimaksudkan agar pluralisme masyarakat Indonesia terwakili aspirasinya dalam mewujudkan rancangan ketatanegaraan Indonesia.

Ketika membicarakan tetang dasar negara Indonesia, para wakil rakyat terbagi ke dalam dua kelompok

besar. Yakni "nasionalisme Islami" dan "nasionalis sekuler".<sup>2</sup>

Kedua kelompok tersebut, masing-masing mempunyai akar dalam sejarah perkembangan gerakan nasionalis dalam paruh pertama abad ini. Perbedaan pandangan dari kedua kelompok tersebut berawal dari perbedaan pijakan. Menurut para nasionalis sekuler perjuangan kemerdekaan ini diawali sejak berdirinya Budi Oetomo tanggal 20 Mei 1908, yang dianggap sebagai organisasi pertama di antara bangsa Indonesia yang disusun dengan bentuk modern dan yang besar artinya. Dari inilah kemudian muncul gerakan-gerakan sekuler lainnya, seperti PNI (tahun 1927), Partindo (1931), Parindra (1935), dan Gorindo (tahun 1937). Gerakan-gerakan ini lahir sebagai

---

2. Istilah 'nasionalis Islami' (*Islamic nationalists*) dalam tulisan ini menunjuk kepada nasionalis yang berjuang berdasarkan Islam dan berpandangan bahwa negara dan masyarakat harus diatur Islam, sebagai agama dalam arti yang luas, mengatur bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga hubungan antara sesama manusia, serta sikap manusia terhadap lingkungannya. Dan istilah 'nasionalis sekuler' (*sekuler nationalists*) menunjuk kepada mereka muslim, kristen, dan lain-lain - yang berpegang kepada pemisahan secara tegas antara negara dan agama (kedua istilah tersebut meminjam dari Endang Saifuddin Anshori, 1997:7). Dan tidak termasuk istilah sekuler dalam pandangan Nurcholis Madjid.

reaksi dari kolonialisme dan ingin menciptakan Indonesia merdeka berdasarkan 'kebangsaan' (Endang Saifudin, 1994:33)

Sementara itu, kelompok nasionalis Islami umumnya berpendapat bahwa berdirinya Serikat (Dagang) Islam tanggal 16 Oktober 1905 adalah titik tolak pergerakan perjuangan-perjuangan kemerdekaan. Bahkan ada yang mengklaim bahwa perjuangan untuk kemerdekaan itu bermula jauh sebelum abad ke-20 ini. Yakni pada masa perjuangan Diponegoro, Imam Bonjol, Cik di Tiro, dan lain-lain.

Mengenai superioritas Islam dalam persepektif sejarah dikemukakan oleh Hamka (Masyumi). Perjuangan untuk menegakkan cita-cita sejak lama dari semua gerakan Islam di Indonesia, yaitu sejak abad ke-1. Hamka menyebut nama-nama pahlawan -Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Cik Ditiro, Pangeran Antasari, Sultan hasanuddin dan lain-lain- yang telah berperang melawan kolonialisme Belanda dalam rangka menciptakan suatu negara berdasarkan Islam. Dalam kaitan inilah, kata Hamka, bahwa apa yang diperjuangkan oleh wakil-wakil Islam dalam majelis adalah semata-mata untuk merealisasikan keinginan yang sudah dipendam lama oleh para pahlawan di atas dalam konteks abad ke-20.

Berbeda dengan Budi Oetomo yang secara sosio-kultural hanya menarik orang-orang terpelajar dari orang-orang ningrat di Jawa Tengah, Serikat Islam sudah sejak berdirinya diarahkan sebagai gerakan rakyat jelata dengan ruang lingkup Indonesia. Kemudian namanya diubah menjadi Partai Serikat Islam Hindia Timur (1923), lalu menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (1929). Pada tahun 1932 Persatuan muslimin Indonesia berdiri di Sumatra.

Perbedaan yang mencolok antara nasionalis sekuler dan nasionalis Islami dapat kita maklumi dari adanya dua jalur pendidikan nasional dengan dua tipe jalan pikiran, sesuai dengan latar belakang pendidikannya. *Pertama*, jalur pendidikan Barat yang intelektual, rasionalis, elitis, dan berorientasi pada birokrasi. *Kedua*, jalur pendidikan model pesantren yang religius cenderung dokmatis, atau paling tidak doktriner populis dan berorientasi politik (Rusli Karim, 1985:168). Dengan demikian keduanya mengalami kesulitan berkomunikasi satu sama lain dalam merumuskan ideologi, politik, strategi, maupun teknik membangun bangsa yang hendak diwujudkan.

Dalam kondisi demikian itu, muncul sosok Abdul Wahid Hasyim, seorang pemimpin muda yang lahir dari bawah, anak pesantren yang bisa ditampilkan dalam gelanggang perjuangan nasional. Dalam perjuangannya A. Wahid Hasyim secara luwes memperjuangkan kepentingan nasional tanpa mengorbankan prinsip yang menjadi keyakinan umat Islam Indonesia. (Safi'i Maarif, 1988:184)

Konsep dasar dari orientasi KH.A. Wahid Hasyim untuk memperjuangkan berlakunya hukum Islam di tanah air adalah orientasi lembaga kekuasaan politik, sebab dengan lembaga itu maka hukum Islam lebih dimungkinkan untuk dapat difungsikan karena memang ada elemen-elemen syari'ah Islam yang memerlukan perangkat lembaga kekuasaan politik (Ali Haidar, 1994:97)

Orientasi perjuangan KH.A. Wahid Hasyim tersebut tidaklah berlebihan jika dilihat dari sejarah masa lalu di Indonesia. Indonesia telah lama pula memiliki tradisi dimana kerajaan-kerajaan memang menjalin agama dalam kehidupan masyarakat dan politik. Misal di negara-negara Hindia, seperti Sriwijaya dan Mojopahit (Deliar Noer, 1988:4)

Perjuangan KH.A. Wahid Hasyim untuk memberlakukan hukum Islam di tanah air pada saat menjelang

kemerdekaan, lebih terfokus pada perjuangan ideologi negara atau dasar negara. Kesempatan yang diberikan kepada KH.A.Wahid Hasyim (sebagai wakil dari NU) di BPUPKI di gunakan sebaik-baiknya untuk meletakkan dasar ideologi Islam di alam Indonesia merdeka.

Sidang BPUPKI mengalami perdebatan sengit ketika membicarakan masalah dasar negara. Perdebatan tajam antara nasionalis sekuler dan nasionalis Islami menghantarkan pada perlunya panitia khusus. Panitia yang membicarakan perdebatan lebih lanjut, maka dibentuklah "Panitia Sembilan" yang diketuai oleh Soekarno (Yamin, 1959:115). Keanggotaan Panitia Sembilan ini diharapkan mampu mewakili pluraisme paham dan agama di Indonesia. Panitia yang beranggotakan Sembilan orang ini terdiri-dari seorang tokoh Kristen moderat dan toleran: A.A. Maramis, sedangkan delapan yang lain beragama Islam, meskipun berbeda ideologi politik. Soekarno, Acmad Subarjo, dan Yamin mewakili ideologi politik nasioanalisme, sedangkan Abikusno, Kahar Mudzakhir, Salim dan Wahid hasyim adalah pendukung aspirasi politik Islam. Empat yang terakhir ini jika dilihat dari sub-golongan Islam, maka kita akan mendapat gambaran sebagai berikut: Abikusno berasal dari SI, Kahar





2. Bagaimana konsep dasar negara menurut nasionalis sekuler?
3. Bagaimana usaha para nasionalis dalam memperjuangkan konsep ideologi mereka?
4. Konsep dasar ideologi apa yang diperjuangkan oleh KH.A.Wahid Hasyim?
5. Apa yang melatarbalakangi ide pemikiran KH.A. Wahid Hasyim tentang ideologi tersebut?
6. Bagaimana cara KH.A Wahid Hasyim dalam memperjuangkan ideologi tersebut?
7. Bagaimana peran ideologi yang diperjuangkan KH.A.Wahid Hasyim dalam penyusunan dasar negara Indonesia merdeka?

### C. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas peran perjuangan KH.A. Wahid Hasyim dalam memperjuangkan ideologi Islam dalam penyusunan dasar negara atau ideologi nasional Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia, dalam wadah perjuangan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Serta keikutsertaannya dalam penandatanganan Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan.



tentang perjuangan dalam sidang penyusunan dasar negara RI., dan dapat digunakan untuk bahan penelitian lebih lanjut.

2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menafsirkan secara benar makna dan tujuan dari dasar negara Republik Indonesia.

#### G. Data Yang Dihimpun

Dalam penelitian ini memerlukan data-data sebagai berikut:

1. Data tentang riwayat hidup KH.A. Wahid Hasyim
2. Data tentang pendidikan KH.A.Wahid Hasyim
3. Data tentang karir perjuangan politik KH.A.Wahid Hasyim
4. Data tentang perjalanan sidang BPUPKI dan PPKI
5. Data tentang ideologi negara
6. Data tentang hubungan antara Islam dan politik
7. Data tentang perjuangan KH.A.Wahid Hasyim sebagai wakil Islam dalam BPUPKI dan PPKI
8. Serta data-data lain yang berkaitan dengan pembahasan

## H. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam skripsi ini, dapat diperoleh dari sumber data sebagai berikut:

1. Sejarah riwayat hidup KH.A.Wahid Hasyim dan karangan tersiar. Aboebakar Aceh
2. Menjelang Indonesia Merdeka tulisan KH.A. Wahid Hasyim
3. Kaliodoskop Politik di Indonesia. Syaifidin Zuhri
4. Himpunan risalah sidang BPUPKI dan PPKI. Sekertariat negara RI.
5. Naskah persiapan UUD 1945. M. Yamin
6. Islam dan politik di Indonesia. Syafi'i Maarif
7. Dibawah bendera Revolusi. Ir. Soekarno
8. Serta buku-buku lain yang memuat data yang dibutuhkan

## I. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*bibliografi research*). Data yang berhubungan dengan sejarah dan perjuangan KH.A.Wahid Hasyim dalam penyusunan dasar negara RI, didiskripsikan lalu dianalisa latar belakangnya. Dengan demikian penelitian ini terwujud diskriptif historis analitik.

## J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat dipahami dengan mudah, maka perlu disusun suatu sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, data yang dihimpun, sumber data, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang ideologi negara, meliputi: pengertian ideologi negara, ideologi negara menurut Islam, dan ideologi atau dasar negara di Indonesia.

Bab ketiga membahas KH.A. Wahid Hasyim dalam penyusunan dasar negara, dengan sub bab: biografi KH.A. Wahid Hasyim, konsep dasar negara menurut KH.A. Wahid Hasyim, dan peran perjuangan KH.A. Wahid Hasyim dalam penyusunan dasar negara RI.

Pada bab keempat, berisi analisa peran perjuangan KH.A.Wahid Hasyim, diawali dengan analisa konsep dasar negara menurut KH.A.Wahid Hasyim, dan peran perjuangan KH.A.Wahid Hasyim dalam penyusunan dasar negara RI.

Pada bab terakhir, kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.